



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5335-5346

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menangani Masalah Kemiskinan Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Musliyandi<sup>1✉</sup>, Hasanuddin<sup>2)</sup>, Mhd. Saeri<sup>3)</sup>

Universitas Riau

email: [musliyandi@grad.unri.ac.id](mailto:musliyandi@grad.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Upaya telah banyak dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Persoalan kemiskinan ini mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multi plier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu program khusus yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial sebagai suatu instansi pemerintahan di bidang sosial. Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Teknik analisis dari penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*) dengan cara mengembangkan metode kerja yang paling efisien, maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, dengan kasus sebagai lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan pemanfaatan data dapat dengan mudah untuk memahami dan menganalisis data informasi dari Program Keluarga Harapan. Tipe *content analysis* dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, yaitu tinjauan kritis (*critical review*). Hasil dari penelitian ini, didapat bahwa koordinasi ntara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan baik. Dilihat dengan ditemukan beberapa kendala dilapangan dalam pelaksanaan program ini sehingga diperlukan kerjasama guna mengatasi kendala-kendala seperti melakukan perbaikan data penerima bantuan PKH agar lebih

tepat sasaran dengan memberikan solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PKH, agar PKH menjadi Program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bangka Tengah.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan*

#### Abstract

Many efforts have been made to reduce poverty through the provision of food, health and education services, expansion of employment opportunities and so on. The problem of poverty has a negative impact that is spread (multi plier effects) on the overall community order. One of the special programmes issued by the Government in order to accelerate poverty reduction is the Conditional Cash Assistance Programme known as the Family Hope Programme (PKH). This programme is implemented by the Department of Social Affairs from the Ministry of Social Affairs as a government agency in the social sector. The general objectives of PKH are to reduce the number and break the chain of poverty, improve the quality of human resources (HR), and change the behaviour of Very Poor Households (RTSM) which is relatively less supportive of welfare improvement. This programme provides cash assistance to RTSM with the condition that they follow the requirements. These requirements are related to improving the quality of education and health. The analysis technique of this research is a case study by developing the most efficient working method, meaning that the researcher conducts an in-depth study of the acceleration of poverty reduction in Central Bangka Regency, with the case as more specific and in-depth related to the use of data can easily understand and analyse information data from the Family Hope Program. The type of content analysis in this qualitative research with a case study approach is critical review. The results of this research show that the coordination between the Central and Local Governments has not gone well. Seen with the discovery of several obstacles in the field in the implementation of this programme so that cooperation is needed to overcome obstacles such as improving data on PKH beneficiaries to be more targeted by providing good solutions for the benefit of the community and increasing the success of PKH implementation, so that PKH becomes the right programme to reduce poverty and improve welfare for poor families in Central Bangka Regency.

Keywords: *Implementation, Family Hope Programme, Poverty*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan memang menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Indonesia, berbagai cara telah dilakukan akan tetapi masih belum mampu menyelesaikan permasalahan ini. Masalah kemiskinan ditandai oleh berbagai hal antara lain: rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Pendapat lain juga menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Salah satu program khusus yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi Pemerintahan di bidang sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah untuk menjangkau masyarakat prasejahtera atau masyarakat kalangan kelas ekonomi kebawah. Program ini direalisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).<sup>2</sup>

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk hal yang menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan menerima program keluarga harapan (PKH) diharapkan mendorong perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang terdaftar

---

<sup>1</sup> Suharto, 2011, hlm. 142–143

<sup>2</sup> Permensos Nomor 1 tahun 2018). Jakarta, Daiakses 23 Februari dari <https://pkhkemensos.go.id>.

dalam data terpadu program penanganan fakir miskin” di Kabupaten Bangka Tengah.

## METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis hal-hal terkait dengan penelitian tersebut maka yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (Case Study) karena dengan mengembangkan metode kerja yang paling efisien, maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Bangka Tengah, dengan kasus sebagai lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan pemanfaatan data dapat dengan mudah untuk memahami dan menganalisis data informasi dari Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui telaah dan mendengarkan pengalaman dari informan penelitian. Dalam hal ini, kasus dikonsepsikan sebagai peristiwa yang berupa rangkaian perilaku nyata.

Tipe content analysis dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, yaitu tinjauan kritis (critical review). Pada tipe ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteiti guna mencari dan menemukan alasan pembenaran atau penolakan suatu produk perilaku. Hasil dari kriti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan (decision maker), serta menjadi acuan kajian bagi penyuluhan kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Selain itu, ada juga indikasi adanya pemotongan penyaluran bantuan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2013, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini berada di posisi ketiga Kabupaten dengan penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 10.030 jiwa.

Dalam Implementasi PKH di Kabupaten Bangka Tengah, dijelaskan mulai dari peran Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH, dimana Kepala Dinas Sosial berperan sebagai pengarah kebijakan terhadap wilayah-wilayah yang yang berpotensi menerima bantuan PKH, hal ini dibuktikan dengan pendataan bagi Desa-desanya yang termasuk kedalam Kecamatan dan Desa Miskin di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu Dinas Sosial

berperan sebagai pelaksana bantuan PKH yang di jalankan oleh seksi-seksi sosial dan kesejahteraan Sosial. Selanjutnya untuk pendataan masyarakat dilakukan oleh pendamping PKH di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah masih belum optimal atau tepat sasaran, karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan data lama dalam menentukan penerima program ini. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama dari PKH yaitu memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan status Kesehatan dan Gizi Ibu Hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk Sekolah Dasar dari RTSM.

Kesehatan adalah refleksi dari kegiatan pelayanan kesehatan dan pemantauan status gizi pada unit terkecil yaitu Posyandu yang tidak lain merupakan program kerja pokok Puskesmas di wilayah kerjanya masing-masing. Tambahan dari informasi yang didapat bahwa angka kematian ibu melahirkan yang semakin berkurang dan kesehatan balita yang semakin baik. Sehingga apabila dilihat dari aspek Kesehatan, masyarakat mulai peduli dengan kesehatan keluarganya melalui: pemeriksaan bulanan bagi ibu hamil, persalinan kelahiran di fasilitas kesehatan yang profesional dan mumpuni, pemeriksaan rutin bagi ibu nifas, penyuksesan program posyandu pada semua lapisan masyarakat, penimbangan rutin balita, imunisasi lengkap bagi para balita, pemberian vitamin tambahan bagi balita, pengecekan kesehatan bagi semua anggota keluarga di Kabupaten Bangka Tengah

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi Anak-anak RTSM

Berdasarkan penggalian informasi, maka diketahui bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah tentang meningkatkan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) sudah tercapai, meskipun masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi Pendidikan yang terjadi Dimana angkanya mngalami kenaikan dan penurunan. Meski demikian pelaksanaan akan tetapi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, juga dukungan dari berbagai lapisan masyarakat karena masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama dalam penerapan PKH di Daerah ini adalah berkaitan dengan kondisi wilayah.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah

diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Untuk itu, keterlibatan pihak-pihak dalam program PKH tersebut sangat mendukung dan seluruh pihak-pihak yang terkait turut mengawasi kelancaran dari program tersebut.

Hambatan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah

#### 1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Dimana adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Sasaran kebijakan tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku sasaran kebijakan meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan sasaran Kebijakan terhadap kebijakan yang dibuat

#### 2. Sumberdaya

Salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumberdaya. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu Sumberdaya yang dimiliki. Penanganan Sumberdaya harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan Sumberdaya yang bersifat strategis, integrated, interrelated dan unity.

Untuk menjalankan suatu program sangat dibutuhkan sumber daya, sebab sumber daya adalah titik tolak dari terlaksananya suatu program. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah seperti jumlah petugas pelaksana, pengetahuan petugas pelaksana dan fasilitas yang mendukung.

Dari informassi yang didapat peneliti diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah hanya mampu menyediakan fasilitas dan sumberdaya Manusia yang seadanya dan sangat terbatas. Tentunya dalam pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari pengelola, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Sikap pengelola yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanakan Program PKH sangatlah diperlukan sebagai implementor di lapangan yang menjalankan menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah. Dukungan berupa moril dan materil terutama dari institusi Pemerintahan menumbuh kembangkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah akan efektif.

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Bangka Tengah . Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staff
- b. Sumberdaya Finansial
- c. Fasilitas

### 3. Hubungan antar Organisasi

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembedaan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerjanya, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Dalam kondisi organisasi kerja non profit sangat besar dan kompleks, pelaksanaan pengorganisasian agar berfungsi untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan kerjasama, perlu diaktualisasikan asas-asas pengorganisasian secara intensif. Beberapa asas tersebut adalah:

1. Asas Kesatuan dan Kejelasan Tujuan
2. Asas Pembagian Kerja
3. Asas Kesatuan Perintah
4. Asas Koordinasi
5. Asas Kelenturan (Flexibility)
6. Asas Fungsionalitas

Berikut ini adalah dimensi Perilaku hubungan antar organisasi yang mencakup komitmen dan koordinasi antar organisasi:

- a. Komitmen

Komitmen berjalan dengan dimulai:

- 1) Membentuk pelaksanaan program keluarga harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
- 2) Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/ kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK)
- 3) Dinas/Instansi sosial provinsi/kabupaten/ kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten
- 4) Kantor kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan
- 5) Melakukan sosialisasi PKH kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan keluarahan.

b. Koordinasi antar Organisasi

Perlu adanya komitmen dan kerjasama bersama mulai dari Pendamping PKH hingga stakeholder untuk sosialisasi hingga eksekusi kegiatan Program Keluarga Harapan ini agar berjalan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut hasil penelitian bahwa semua aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH di Kabupaten Bangka Tengah memiliki peranan yang sangat penting. Semua aktor memiliki tanggung jawab masing-masing. Semua aktor yang terlibat saling berkoordinasi, untuk mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat di Kabupaten Lamongan khususnya. Terutama peran seorang pendamping, karena pendamping adalah orang yang berhubungan langsung dengan para peserta PKH tersebut.

Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dan kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat spesialisasi, hierarki, wewenang dan hubungan.

5. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang

dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.

- a. SOP (*Standar Operating Procedur*)
- b. Fragmentasi

## 6. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi

Menjaga kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan bersama. Kondisi sosial yang harmonis, politik yang stabil, dan perekonomian yang kuat menjadi landasan kehidupan yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini dapat diperhatikan sebagai berikut:

### a. Kontrol Politik

Kontrol politik dalam Implementasi Kebijakan Program PKH penting dilakukan dengan cara mengarahkan aktor-aktor yang terlibat dalam program PKH tersebut.

pengarahan dalam aspek politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu, agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
- 2) Perintah merupakan perintah dari Pengelolaan PKH kepada pimpinan atau bawahan serta staf-staf yang meliputi masing-masing divisi untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
- 3) Pendelegasian Wewenang bersifat lebih umum apabila dibandingkan penyampaian perintah untuk menjalankan kerjanya yang telah diatur oleh atasan.

### b. Ekonomi

Penganggaran sangat penting bagi organisasi dalam mengaktualisasikan perencanaan, karena tidak hanya berkenaan dengan masalah penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya, sebagai kegiatan tatalaksana keuangan dalam manajemen operatif atau administrasi keuangan dalam arti sempit

## SIMPULAN

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan baik, masih diperlukan kerjasama Pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021, salah satunya dalam melaksanakan sosialisasi sehingga program bantuan Tunai bersyarat ini yang di berikan kepada keluarga miskin ini bisa di manfaatkan secara maksimal. Selain itu diperlukan kerjasama guna mengatasi kendala-kendala seperti melakukan perbaikan data penerima bantuan PKH agar lebih tepat sasaran dengan memberikan solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PKH, agar PKH menjadi Program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bangka Tengah.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangka Tengah mendapat dukungan dari berbagai pihak Kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat menengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian, ini belum optimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan optimal. Hal ini terutama terlihat dari Sumberdaya belum cukup baik namun dalam hal ini sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Calpulis. Yogyakarta.
- Arif Citra Permana. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal MADANI Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Avenue, Rajdamnern Nok. 2008. *Perumahan bagi kaum miskin di kota-kota Asia. (Wicaksosmo Sarosa dkk. Terjemahan)*. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
- Badan Pusat Statistik (2019) *Data Penduduk Miskin* diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Budiarjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Prima Grafika. Jakarta.
- Cahyo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu . *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (68 - 74). Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Citra Ayu Rahmanda. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota*

- Batu. *Jurnal Respon Publik* ISSN: 2302-8432 Vol. 13, No. 5, Tahun 2019, Hal: 10-15. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Dinata Firmansyah. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 20 No. 2, Desember 2021. Universitas Indonesia.
- Fajrin Mahmud, Nuryanti Mustari, Nasrulhaq. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, April 2020 Volume 6 Nomor. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh.
- Fuad Ridwan, H.M. Uhaib As'ad, Junaidy. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Mai. *Jurnal Ilmu Administrasi publik*, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. GP Press: Jakarta.
- Kartika Ayu, Sutomo, Kholiq Azhari. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia.
- Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 460/1282/DINSOS-PMD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor:460/103.1/DINSOS-PMD/2022 Tentang Penertapan Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2022.
- Mahi, Ali Kabul dan Trigunarso Sri Indra. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Kencana. Depok.
- Moh. Dulkiyah dkk. The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio- Economic of Poor Families; A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* Volume 7, Issue 1, January – Juni 2018.
- Mohanty, L. N. P. dan Swati Mohanty. 2005. *Slum in India*. India: APH Publishing.
- Muhammad Daud. Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Besar. *Jurnal Serambi Akademica*, Volume VI, No. 2, November 2018. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Banda Aceh.
- Munawwarah Sahib. *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ditetapkan Kementerian Sosial Pada Tanggal 27 Mei 2021.

Rafiuddin, Muh. (2016) *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang.

Sekar Galih Asmoro, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Siti Rizayani, Syaharuddin, Muhammad Rezky Noor Handy, Ersis Warmanyah Abbas, Jumriani. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru*. Universitas Lambung Mangkurat.

Stoker. Gerry dan David Marsh. 2017. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Nusa Media. Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suharto, Edi, *Kebijakan sosial*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan 3. Rafika Aditama: Bandung.

Sutri Handayani. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan*. Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, Universitas Islam Lamongan.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Wimmy Halim. *Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang*. *Ilmu Sosial dan Keagamaan Ilam* Volume 18 Nomor 2 July-Desember/ 2021.

Yunindyo Sasmito. *Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengeluaran Rumah. Tangga Untuk Pendidikan di Pulau Jawa (Analisis Evaluasi Dampak Propensity Score Matching (PSM) Data IFLS 5)*. Universitas Gajah Mada.